

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang lumayan kompleks dan sensitif di masyarakat, terutama pada daerah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar. Di Indonesia sendiri, pemerintah telah mengembangkan berbagai program bantuan untuk membantu masyarakat kurang mampu, salah satunya adalah pemberian bantuan pangan berupa beras kepada masyarakat yang membutuhkan.

Beras merupakan komoditas yang sangat strategis sehingga pemerintah harus selalu berupaya menstabilkan harga beras. Ketika harga beras melonjak naik, maka sekitar 40 juta konsumen yang umumnya berpenghasilan rendah mengalami kesulitan untuk mengakses pangan. Hal itu memberikan tekanan besar bagi pemerintah untuk mengendalikan harga beras kedepannya (Aryani, 2021).

Karena menjadi bagian dari tekanan besar bagi pemerintah, maka dalam siaran pers yang dilansir dari ([www.ekon.go.id](http://www.ekon.go.id), 2024), menyebutkan bahwa presiden Joko Widodo menetapkan perpanjangan pendistribusian program Bantuan Pangan Beras yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, terutama masyarakat miskin khususnya yang terpapar konsekuensi kenaikan harga pangan. Berdasarkan data dari program Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE), program ini akan mendistribusikan beras sebanyak 10 kg per bulan kepada masing-masing 22 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP), penyaluran ini akan dikelola oleh Perum Bulog.

Bantuan Pangan Beras adalah satu cara pemerintah dalam menjaga stabilitas harga beras, guna mencegah kenaikan harga sebelum memasuki musim panen ([www.bulog.co.id](http://www.bulog.co.id), 2024). Berdasarkan berita yang dilansir dari ([kemenkopmk.go.id/](http://kemenkopmk.go.id/), 2024), Muhadjir mengucapkan, "Bantuan beras merupakan upaya pemerintah untuk mengatasi dampak kemarau panjang akibat badai El-Nino".

Namun, sering kali dalam menyalurkan bantuan pangan beras tersebut beberapa tidak tepat sasaran karena berbagai faktor, termasuk kesalahan dalam mengumpulkan informasi penerima. Salah satu contohnya adalah di Kota Bogor, Soni Gumilar yang merupakan kepala Departemen Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP), menemukan adanya ketidaksesuaian data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak tepat sasaran mengenai penerima manfaat program cadangan pangan pemerintah (CPP) (Maullana & Bempah Triyadi, 2023). Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan tindakan yang efektif. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah menentukan kelayakan penerima Bantuan Pangan Beras Bulog dengan menggunakan dua metode yakni *Electre* dan *Simple Additive Weighting*.

Metode *ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la Réalité/ Elimination And Choice Expressing Reality)* merupakan metode pengambilan keputusan yang peringkatannya dipengaruhi oleh banyak kriteria. Metode ini membandingkan alternatif secara berpasangan sesuai dengan kriteria penting masing-masing (Triwibowo et al., 2019). Sedangkan Metode *Simple Additive Weighting* juga dikenal sebagai metode penjumlahan terbobot yang memerlukan normalisasi matriks keputusan (X) ke tingkat yang memungkinkan perbandingan di antara semua penilaian alternatif (Safitri et al., 2021). Pada penelitian ini nantinya akan menggunakan metode *Electre* dan *Simple Additive Weighting* yang merupakan salah satu Sistem Pendukung Keputusan dan akan melalui proses perhitungan analisis pengambilan keputusan multikriteria. Keluaran dari penelitian ini berupa laporan dalam bentuk perbandingan dan perbandingan data warga Rt. 03. Rw. 04. Desa Sukomalo yang layak menerima bantuan pangan beras bulog.

Dalam penelitian (Ramadhani & Astuti, 2020) menyatakan bahwa dengan menggunakan metode *Electre*, dapat ditentukan calon penerima bantuan raskin yang tepat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan seperti jenis pekerjaan, total penghasilan, jumlah anak, kepemilikan rumah, ukuran rumah, keadaan rumah, dan daya listrik rumah. Penelitian ini berhasil menentukan alternatif terbaik untuk penerima bantuan raskin. Kemudian penelitian (Wolo et al., 2019) juga menyatakan bahwa penerapan metode *Simple Additive Weighting* bisa

membantu Kelurahan Kota Uneng dalam menetapkan warga yang berhak memperoleh bantuan beras untuk warga miskin. Proses penentuan penerimaan Raskin bisa dilakukan secara objektif dan berlandaskan kriteria yang telah ditentukan, sehingga metode SAW memberikan kontribusi dalam pemilihan program Raskin di Kelurahan Kota Uneng.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka peneliti akan menerapkan perbandingan metode *Electre* dan *Simple Additive Weighting* dalam menetapkan peringkat data warga Desa Sukomalo yang layak menerima bantuan pangan beras bulog dengan memungkinkan pengambil keputusan mempertimbangkan beberapa kriteria secara bersamaan saat memilih alternatif terbaik.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam rangka mengoptimalkan proses menentukan kelayakan penerima bantuan pangan beras bulog, beberapa rumusan masalah yang dapat diajukan adalah:

- Bagaimana metode *Electre* dan metode *Simple Additive Weighting* diterapkan dalam menentukan kelayakan penerima bantuan pangan beras bulog?
- Apakah penerima bantuan pangan beras bulog sudah tepat sasaran saat perhitungan dengan metode *Electre* dan metode *Simple Additive Weighting*?
- Metode mana yang lebih efektif dalam melakukan penentuan kelayakan penerima bantuan pangan beras?

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk menerapkan metode *Electre* dan metode *Simple Additive Weighting* dalam menentukan kelayakan penerima bantuan pangan beras bulog.
- Untuk menilai apakah penerima bantuan pangan beras bulog sudah tepat sasaran dengan perhitungan metode *Electre* dan metode *Simple Additive Weighting*.
- Untuk menentukan metode mana yang lebih efektif dalam penentuan kelayakan penerima bantuan pangan beras.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain:

- Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang penggunaan metode pengambilan keputusan dalam menentukan kelayakan penerima bantuan pangan beras bulog.
- Memberikan panduan bagi pihak terkait dalam menentukan kriteria-kriteria yang relevan dalam proses pemilihan penerima bantuan.